

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi

1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari kata *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.¹⁵ Pokok pikiran mengenai pemberdayaan berkaitan dengan konsep kekuasaan, yang sering diartikan dengan kemampuan individu untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari minat dan keinginan mereka.¹⁶

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan, dari arti kata daya, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk mendapatkan daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan

¹⁵ Muhammad Hasan dan Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: CV.Nur Lina, 2018), hal.155

¹⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Persepektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.374

upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.¹⁷

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan/kemampuan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. Senada dengan pengertian ini Prijono dan Pranaka menyatakan bahwa ; pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*.

¹⁷ Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.77

Pemaknaan pengertian yang pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang / belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau kebedayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.¹⁸

Keberdayaan menurut Adjid adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya), maka dari itu pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.¹⁹ Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat, kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan.²⁰

Kadarisman menyatakan pemberdayaan adalah merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan yang diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.²¹ Pada prinsipnya pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang

¹⁸ *Ibid*, hal.78

¹⁹ Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K.Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.28-29

²⁰ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.88

²¹ M.Chazienul Ulum, *Perilaku Organisasi: Menuju Orientasi Pemberdayaan*, (Malang: UB Press, 2016), hal.140

atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar akulturasi diri. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan dari pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.²²

Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.²³ Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁴

²² *Ibid*, hal.145

²³ Bambang Supriyono, et.all., "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. 4,hal.10-11

²⁴ Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal.81

Berkenaan dengan pemakaian konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.²⁵

Dari pernyataan para ahli mengenai pemberdayaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang mempunyai kekuatan kepada pihak yang tidak berdaya/belum berdaya agar pihak yang belum berdaya dapat menangani masalahnya sendiri seperti masalah kemiskinan dan ekonomi yang nantinya orang tersebut dapat mencapai kemandirian dalam segala hal baik ekonomi maupun lainnya.

Dari berbagai tulisan Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁶

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian.

²⁵ Sulistiyani, Kemitraan..., hal.79

²⁶ Mardi Yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, <https://www.bappenas.go.id/>, diakses pada 13 November 2018

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2. Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat ini

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana;

(3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu.²⁷

1) Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

2) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

²⁷ *Ibid*, hal. 7

3) Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

4) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5) Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi

adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

B. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)

1. Program Jalin Matra secara umum

Berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka di periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur 2014-2019 yakni Soekarwo dan wakilnya Gus Ipul berkomitmen untuk meningkatkan serta memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang direalisasikan dalam wujud Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA). Jalin Matra ialah singkatan dari Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera. Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya(wong cilik) berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015 dengan status kesejahteraan 30% terendah.²⁸

Dasar Hukum Jalin Matra di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur. Dalam Hal ini Jalin Matra Jawa Timur dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

²⁸ Pedoman Umum JALIN MATRA...,hal.2

1) Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2)

adalah program jalin matra yang menysasar pada rumah tangga hampir miskin yang berpotensi/sudah memiliki usaha yang akan diberikan pinjaman modal usaha yang akan disalurkan melalui BUMDesa.²⁹

2) Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK)

adalah program jalin matra yang secara khusus menysasar kepada masyarakat miskin dengan kepala rumah tangga perempuan.³⁰

3) Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM)

adalah program jalin matra yang menysasar kepada masyarakat yang sangat miskin agar bisa meningkatkan kehidupannya.³¹

2. Jalin Matra PK2

Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), memiliki tujuan dengan secara khusus menmbidik membidik kelompok rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 atau orang yang masuk dalam kategori kelompok Rumah Tangga yang Hampir Miskin (RTHM). Kelompok RTHM tersebut lazim disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentang menjadi miskin. Pada kenyataannya RTHM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-harinya sebenarnya adalah dalam keadaan relatif cukup mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi jika

²⁹ Bidang Pengembangan Perekonomian masyarakat, Jalin Matra PK2, <http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2>, diakses pada 25 November 2018

³⁰ Bidang Pengembangan Perekonomian masyarakat, Jalin Matra PFK, <http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2>, diakses pada 25 November 2018

³¹ Bidang Pengembangan Perekonomian masyarakat, Jalin Matra BRTSM, <http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2>, diakses pada 25 November 2018

ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.

Adapun tujuan umum dari Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) adalah untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak tererosok pada desil 1. Sedangkan tujuan khusus dari Jalin Matra PK2 adalah :³²

- 1) Mendorong masyarakat rentan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
- 2) Mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
- 3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian pedesaan.

Ruang lingkup dari Program Jalin Matra PK2 ini adalah :³³

- 1) Pembentukan/Penguatan BUMDesa;
- 2) Pengembangan usaha Pokmas;
- 3) Peningkatan Kapasitas RTS;
- 4) Pendampingan;

Sasaran pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) harus merujuk pada data PPFM 2015. Pada tahap awal, diprioritaskan pada rumah tangga sasaran (RTS) dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) RTS yang masuk ke dalam kategori rumah tangga rentan pada desil 2 dan 3;
- 2) RTS calon penerima dana pinjaman harus berusia produktif, yaitu usia antara 15-65 Tahun;
- 3) Diutamakan RTS yang memiliki potensi untuk melakukan usaha produktif, yaitu: (i) RTS yang memiliki usaha produktif; (ii) RTS yang memiliki rencana untuk melakukan usaha produktif atau yang berpotensi melakukan usaha produktif;
- 4) RTS yang telah memenuhi kualifikasi tersebut, diharapkan secara sukarela membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dengan jumlah anggota

³²<http://bapemas.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2>, diakses pada 10 Maret 2018

³³ *ibid.*

sebanyak 5 s/d 10 rumah tangga, baik yang memiliki potensi usaha yang sejenis maupun tidak sejenis, atau memiliki kedekatan tempat tinggal.

Agar mencapai sasaran yang diharapkan, maka program Jalin Matra PK2 mempunyai prinsip dalam pengelolaannya, yaitu :³⁴

1) Usaha ekonomi produktif

Dana Jalin Matra PK2 dikhususkan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif pada RTS yang sudah memiliki usaha, memiliki rencana usaha atau berpotensi melakukan usaha.

2) Ekonomi spesifik kawasan

Usaha tersebut diutamakan pada usaha ekonomi spesifik yang sesuai dengan potensi dan/atau tipologi desa/kawasan setempat. Tipologi desa yang menjadi ciri khas usaha masyarakat seperti, usaha bidang pertanian, perdagangan, pesisir, peternakan dan lain-lain.

3) Kompetisi sehat

Kompetisi sehat dilaksanakan oleh BUMDesa bersama Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Kelompok yang telah dibentuk berdasarkan potensi usaha baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis diharapkan membuat usulan kegiatan usaha, yang kemudian dilakukan kompetisi antar kelompok dan akan dipilih kelompok yang usahanya layak untuk didanai.

4) Berbasis kompetensi lokal

Kegiatan usaha kelompok masyarakat diutamakan berbasis potensi lokal desa setempat atau sesuai dengan tipologi desa yang menjadi ciri khas

³⁴Pedoman Umum JALIN MATRA, hal.14-15.

usaha masyarakat, yang meliputi usaha bidang kehutanan, perindustrian/jasa, perdagangan, persawahan, pertambangan, pesisir dan nelayan serta peternakan.

5) Kreatifitas dan kearifan usaha

Jalin Matra PK2 mengedepankan ide-ide kreatif dan inovatif berdasarkan potensi lokal dengan tidak merubah budaya dan kegiatan yang dominan telah dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memilih dan mengembangkan potensi usaha, model pengelolaan usaha, sistem pembagian hasil yang disesuaikan dengan kearifan lokal yang selama ini telah dan/atau tengah terbangun dalam masyarakat.

6) Bergulir

Prinsip pengelolaan dana Jalin Matra PK2 adalah pinjaman modal murah kepada Pokmas yang harus dikembalikan kepada BUMDesa, yang selanjutnya digulirkan lagi kepada Pokmas yang bersangkutan atau ke Pokmas yang lain. Jangka waktu dan mekanisme perguliran dana diserahkan pengaturannya pada musyawarah kearifan lokal masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Jalin Matra PK2 dilihat dari:³⁵

1) Tepat Sasaran

Pemanfaat dana Jalin Matra PK2 adalah rumah tangga sasaran berdasarkan Program Penganangan Fakir Miskin (PPFM) 2015 pada desil 2

³⁵*Ibid*, hal.19

dan desil 3, setelah dilakukan proses klarifikasi, klasifikasi, verifikasi dan kelayakan usaha RTS.

2) Tingkat Pengembalian Pinjaman

Pokmas/RTS wajib mengembalikan dana pinjaman kepada BUMDesa dengan mekanisme yang telah disepakati sehingga dana pinjaman tersebut dapat digulirkan kembali kepada Pokmas yang sama atau Pokmas lain.

3) Peningkatan Pendapatan

Dana pinjaman Jalin Matra PK2 yang diberikan kepada RTS untuk modal usaha atau pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan.

4) Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Jalin Matra PK2 menginisiasi terbentuknya BUMDesa yang difungsikan sebagai pengelola program di masing-masing desa lokasi Jalin Matra PK2.

Dalam menyalurkan bantuan keuangan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) menyalurkan bantuannya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, BUMDesa berfungsi sebagai pengelola Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2).

Adapun tugas dan tanggung jawab BUMDesa dalam pengelolaan dana Jalin Matra PK2 adalah sebagai berikut :³⁶

- 1) Melakukan Identifikasi Potensi Desa
- 2) Melaksanakan Klarifikasi dan klasifikasi data RTS bersama Pendamping Desa;
- 3) Memfasilitasi pembentukan Pokmas Jalin Matra PK2;
- 4) Memfasilitasi rebug Pokmas dalam rangka penyusunan rencana usaha Pokmas;
- 5) Bersama Pendamping Kabupaten melakukan analisa kelayakan usaha Pokmas melalui kompetisi sehat untuk menetapkan Pokmas yang layak menerima pinjaman dan penentuan nilai pinjaman;
- 6) Mengajukan dokumen pencairan dana Jalin Matra PK2 kepada Pemerintah Desa;
- 7) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan pinjaman pokmas;
- 8) Membantu penanganan pengaduan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Jalin Matra PK2;
- 9) Melaporkan dan mempertanggung- jawabkan pelaksanaan Jalin Matra PK2 di Desa kepada Pemerintah Desa;
- 10) Menyusun Profil BUMDesa dan diserahkan kepada pemerintah Desa;
- 11) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan pemanfaatan danapinjaman di Pokmas;
- 12) Mendokumentasikan pelaksanaan Jalin Matra PK2 di masing-masing Desa;
- 13) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pasca program;
- 14) Membantu Pemerintah Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

3. Kontribusi Jalin Matra PK2

Kata “Kontribusi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti uang iuran (kepada perkumpulan atau sebagainya) dan juga berarti sumbangan.³⁷ Definisi kontribusi berdasarkan kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan kata “kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan”, dalam pengertian yang lebih mendalam kontribusi diartikan sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan

³⁶ *Ibid*, hal.30-31

³⁷ <https://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses pada 31 Oktober 2018

oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Pengertian Kontribusi juga diungkapkan oleh Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yakni mengartikan kata kontribusi adalah sebagai bentuk bantuan iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan kedua pengertian di atas bahwa kontribusi adalah bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. Hal ini akan mempersempit bentuk kontribusi itu sendiri, hal ini akan menimbulkan makna yakni hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan. Jadi pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada bantuan pemberian uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan pemikiran, bantuan tenaga dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.³⁸

Sejalan dengan paparan dari makna “kontribusi”, yang mana tidak terbatas hanya kontribusi secara materi/dana saja namun juga juga kontribusi dalam bentuk lain yakni kontribusi non materi. Dalam program bantuan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mana masyarakat akan menjadi lebih

³⁸Adzikra Ibrahim, Konsep dan Pengertian Kontribusi, <https://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>, diakses pada 31 Oktober 2018

sejahtera dan juga terangkat perekonomiannya. Tujuan umum program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) adalah membantu masyarakat rentan miskin tidak terperosok lebih dalam kedalam jurang kemiskinan yang lebih besar. Adapun kontribusi Jalin Matra PK2 kepada pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni :

1) Kontribusi Materi

Kontribusi materi adalah kontribusi yang kaitannya dengan sumbangan berupa uang/dana. Dalam hal ini kontribusi Jalin Matra PK2 meliputi :

a) Bentuk bantuan pinjaman modal Jalin Matra PK2

Bantuan pinjaman modal Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan merupakan bantuan keuangan/modal dari Pemerintah Jawa Timur, Pemberian dana pinjaman murah kepada RTS melalui BUMDesa yang digunakan sebagai modal usaha/tambahan modal usaha ekonomi produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka.³⁹

b) Sasaran bantuan program Jalin Matra PK2

Sasaran dari bantuan Jalin Matra PK2 adalah masyarakat yang rentan menjadi miskin yakni yang berada pada desil 2 dan desil 3, yang mana penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berada pada desil 2 dan 3 sudah ditentukan oleh Pemerintah Jawa Timur berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) 2015.⁴⁰

c) Jumlah dana bantuan Jalin Matra PK2 per warga

³⁹ Pedoman Umum JALIN MATRA Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Jawa Timur Tahun 2018, hal.11

⁴⁰ *Ibid.*, hal.4

Bantuan pinjaman modal yang akan diterima oleh RTS akan berbeda tergantung kesepakatan dari pengelola yakni oleh BUMDesa setempat. Jumlah dana pinjaman modal tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 sampai Rp.3.000.000,00.

d) Syarat penerima bantuan Jalin Matra PK2

Syarat-syarat penerima bantuan pinjaman modal PK2 tersebut seperti : RTS berusia produktif, yakni antara 15-65 tahun, masuk kedalam kriteria desil 2 dan 3, RTS berpotensi/sudah memiliki usaha, sukarela membentuk kelompok masyarakat.⁴¹

2) Kontribusi Non Materi

Kontribusi non materi adalah bentuk lain dari kontribusi selain yang berkaitan dengan dana/uang, dalam hal ini Kontribusi Jalin Matra adalah yang terkait dengan pendampingan dan evaluasi.

a) Ketepatan sasaran bantuan Jalin Matra PK2

Pengelola dalam hal ini BUMDesa merealisasikan bantuan Jalin Matra harus sesuai dengan data penerima yang sudah ditetapkan dari Pemerintah Jawa Timur yang tertera pada Basic Data Terpadu yang akan diverifikasi lagi kenyataannya oleh pengelola Jalin Matra PK2.

b) Sistem pendampingan dari pengelola terkait Jalin Matra PK2

Dana bantuan dari program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dikelola oleh BUMDesa yang akan mendampingi penerima bantuan jalin Matra PK2, pendampingan pengelola berupa membantu

⁴¹ *Ibid.*, hal.7

pembentukan pokmas, melakukan verifikasi kelayakan RTS penerima pinjaman, memastikan pemanfaatan pinjaman, memastikan keberlangsungan usaha RTS yang diharapkan terjadi peningkatan ekonomi. Pembentukan Pokmas merupakan salah satu syarat RTS dapat menerima pinjaman modal PK2, yang mana RTS secara sukarela membentuk pokmas beranggotakan lima sampai sepuluh orang berdasarkan usaha sejenis atau tidak sejenis atau bisa karena faktor kedekatan rumah tempat tinggal, dari pokmas akan ada ketua pokmas yang akan menjadi penanggung jawab dalam pokmas tersebut.⁴²

c) Tingkat pengembalian bantuan Jalin Matra PK2

Dana pinjaman modal yang diberikan kepada RTS harus dikembalikan kepada BUMDesa guna untuk dikelola berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan pinjaman bisa menggunakan pola konvensional atau bagi hasil sesuai dengan kearifan lokal yang dibuat dalam rembug Pokmas bersama BUMDesa. Untuk pengelolaan pinjaman secara konvensional, jasa pinjaman minimal 0,5% dan maksimal 1%.⁴³

d) Pengelolaan dan evaluasi Jalin Matra PK2

Pengelolaan dana Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan sepenuhnya dikelola BUMDesa guna membantu masyarakat rentan miskin. Pinjaman PK2 dapat digunakan untuk modal usaha bersama dalam pokmas atau usaha sendiri, dan usaha tersebut harus dilaporkan untuk melihat perkembangannya dan demi untuk pelestarian pinjaman PK2 jika

⁴² *Ibid*, hal.34

⁴³ *Ibid*, hal.51

dana sudah kembali dapat di putar ke RTS lain guna tercapainya pemerataan. Setelah penyaluran bantuan keuangan Jalin Matra PK2 dari BUMDesa kepada RTS, maka pengurus akan melakukan evaluasi dari apa yang telah dilakukannya, apakah kegiatan PK2 sudah berjalan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. BUMDesa bertanggung jawab untuk pelastarian dana Jalin Matra PK2, maka BUMDesa sebagai pengelola akan mengawasi usaha yang dilakukan RTS secara berkala.⁴⁴

C. Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kemiskinan adalah berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta, kekurangan (berpenghasilan rendah) lalu kemiskinan itu sendiri adalah keadaan miskin. Jadi dapat diartikan kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang atau kelompok dalam kekurangan/penghasilan rendah.⁴⁵ Kemiskinan menurut Emil Salim merupakan suatu situasi atau keadaan dimana manusia atau penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Dan mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan yang paling pokok semisal makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hal.51

⁴⁵ <https://https://kbbi.web.id/kemiskinan> diakses pada 8 November 2018

⁴⁶ Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*.(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hal.94

Menurut Andre Bayo Ala⁴⁷, terdapat beberapa aspek kemiskinan yaitu:

- 1) Bahwa kemiskinan sifatnya multidimensional karena menyangkut karakter manusia yang memerlukan berbagai jenis kebutuhan dan terkait dengan berbagai dimensi kehidupan. Kemiskinan meliputi aspek primer yaitu miskin asset, organisasi sosial politik dan pendidikan dan keterampilan. Dan juga aspek sekunder yaitu miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan juga menyangkut berbagai dimensi diantaranya berupa kekurangan protein dan kalori, sarana perumahan yang tidak sehat, pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas dan fasilitas kesehatan yang terbatas.
- 2) Aspek- aspek kemiskinan yang saling berkaitan yang berarti bahwa persoalan kemiskinan menyangkut dimensi kehidupan individu dan sosial, ekonomi dan non-ekonomi yang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Kemiskinan menyangkut nasib kehidupan manusia yang berarti bahwa persoalan kemiskinan tergantung bagaimana manusia mensikapinya. Jadi kebijakan pengentasan kemiskinan harus berorientasi pada upaya merubah pola pikir dan perilaku masyarakatnya agar terlepas dari jerat kemiskinan.

Konsep kemiskinan bersifat multiidimensional, oleh karena itu cara pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Dilihat dari sisi *proverty profile* masyarakat, menurut Tjokrowinoto, kemiskinan tidak hanya sekedar menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) saja, tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), akses kepada berbagai peluang kerja yang sulit, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, tingkat ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁴⁸

⁴⁷ Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta:UPFE-UMY, 2007), hal.34

⁴⁸Sulistiyani, *Kemitraan*, hal.27-28

Kemiskinan acapkali terkait dengan kerentanan. Orang miskin biasanya sekaligus berada pada kondisi yang rentan, atau lemah. Orang miskin tidak memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidang. Secara eksplisit dapat diketahui bahwa orang miskin secara ekonomi, dibarengi oleh miskin pendidikan, sedikit wawasan, tidak berdaya dan tidak memiliki kekuasaan. Lemahnya sistem pertahanan ekonomi telah mempengaruhi ketahanan di banyak bidang. Dengan demikian jika mendapatkan tekanan kondisi sedikit saja, sudah mengalami kesulitan dan juga jatuh.

Kemiskinan juga dibarengi oleh ketidakberdayaan. Orang miskin tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup. Biasanya tidak berdaya secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial maupun kekuasaan. Ketidakberdayaan ekonomi disebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi, kegiatan pelayanan jasa, dan lain-lain. Walaupun masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan produksi, pelayanan jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya, biasanya hanya dalam komoditas yang rendah nilainya, dengan perputaran waktu yang lambat, sehingga sangat sedikit keuntungan yang didapat. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk konsumsi, dan tidak melakukan tabungan atau membangun permodalan dari komoditas yang diusahakannya.

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Chambers menyatakan bahwa masyarakat miskin ialah kelompok warga yang kurang beruntung. Berikut kriteria sebagai tolak ukur yang bersifat kualitatif atas ketidakberuntungan tersebut dengan beberapa ciri berikut ini :⁴⁹

- 1) Rumah tangga miskin hanya memiliki sedikit sekali harta kekayaan atau bahkan tidak punya sama sekali. Tempat tinggalnya berukuran sempit yang terbuat dari bambu, kayu, tanah liat dan perabotan yang dimiliki hanya sedikit. Rumah tangga miskin ada juga yang mempunyai rumah berdinding tembok dan berlantai keramik, hanya saja itu berkat jerih payah anggota keluarga yang sebagai tenaga migran di luar negeri. Rumahnya sering tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci dan kakus. Kondisi ekonomi sehari-hari rumah tangga ini rapuh bahkan untuk kebutuhan pokok setiap hari mengalami kesulitan. Produktivitas tenaga kerja rendah dan sumber pendapatan utama tertumpu pada kiriman uang dari luar negeri yang tidak terjadwal. Pola nafkah cenderung bertani pada lahan yang sempit.
- 2) Rumah tangga miskin lemah jasmani. Beban tanggungan ekonomi yang harus dipikul kepala rumah tangga miskin cukup berat. Kehidupan sehari-harinya dijalani dengan kepasrahan. Sebagian merasa hidupnya dipaksa berputar terus untuk memikirkan pembagian alokasi biaya hidup untuk hari ini dan bahkan tak sempat berpikir hari esok. Kebutuhan biaya kesehatan terabaikan karena mementingkan biaya kebutuhan pokok serta pola makan

⁴⁹ Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.18-22

dengan status gizi yang rendah menyebabkan kondisi jasmani anggota rumah tangga miskin menjadi menderita gizi buruk.

- 3) Rumah tangga miskin tersisih dari arus kehidupan. Rumah tangga miskin di pedesaan pada umumnya bertempat tinggal di lokasi pinggiran dan terpencil jauh dari keramaian dan pusat informasi. Begitu juga di perkotaan, warga miskin menempati rumah tinggal yang berada di pemukiman padat yang dihipit oleh gedung/toko, tepian sungai, sekitarn stasiun kereta api atau terminal bus. Akses terhadap fasilitas pendidikan rendah yang menyebabkan mereka putus sekolah. Warga miskin ini jarang bersedia aktif berpartisipasi dalam ragam pertemuan, rapat maupun kegiatan sosial formal/non formal.
- 4) Rumah tangga miskin yang rentan. Rumah tangga miskin hanya mempunyai penyangga yang lemah untuk menghadapi berbagai kebutuhan yang mendesak. James Scott menyatakan kerentanan rumah tangga miskin khususnya yang nafkah sebagai petani di pedesaan dibuktikan dari etika subsistensi yang melekat pada keluarganya. Dengan kehidupan yang berada pada ambang batas subsistensi mengakibatkan warga petani miskin rentan terserang berbagai masalah walau hanya menghadapi suatu bencana yang minimum. Kondisi bencana minimum bisa seperti kondisi ketersediaan pangan yang minim.
- 5) Rumah tangga miskin tidak berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat miskin tidak terlepas dari tekanan internal dan eksternal sistem sosial di lingkungan masyarakat sekitarnya. Akses kesempatan untuk mendapat pekerjaan,

pendidikan, kesehatan, komunikasi, teknologi tergolong relatif rendah. Persaingan ketat harus dihadapi untuk mendapatkan pekerjaan produktif.

Emil Salim memberikan ciri-ciri penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan sesuai dengan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan, sehingga mereka tidak mampu menciptakan pendapatan.
- 2) Mereka tidak memiliki keterampilan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha. Sedangkan syarat untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan adalah harus mempunyai jaminan kredit.
- 3) Tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar. Pendidikan rendah membawa akibat produktifitas rendah dan pendapatan rendah, sehingga mereka tidak dapat menikmati pendidikan tinggi.
- 4) Mereka banyak tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah atau dengan tanah yang luasnya terbatas. Mereka banyak yang menjadi buruh tani dan bekerja pada sektor pertanian dengan musiman, sehingga pekerjaan mereka tidak bersambung dan menjamin pekerjaan mereka.
- 5) Banyak mereka tinggal di kota dengan tidak memiliki keterampilan, sedangkan pekerjaan di kota dengan sektor industri yang banyak menggunakan tehnik tinggi. Dengan demikian mereka tidak punya peluang

⁵⁰ Junaidin Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro....*, hal.95

untuk masuk pada sektor tersebut. Sehingga kehadiran mereka akan menciptakan kemiskinan yang dapat menimbulkan masalah baru di kota.

3. Jenis – jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis sesuai sudut pandang yang digunakan. Menurut Sumodiningrat kemiskinan dibagi menjadi lima jenis, adalah sebagai berikut :⁵¹

1) Kemiskinan absolut

Menunjukkan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya (pendapatan) begitu rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.⁵²

2) Kemiskinan relatif

Jenis kemiskinan ini dicirikan bila pendapatan yang diperoleh seseorang atau rumah tangga berada di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.

3) Kemiskinan Kultural

Pada kemiskinan kultural terdapat sikap dan perilaku seseorang atau rumah tangga yang tidak mau bersedia bekerja secara produktif untuk perbaikan mutu kehidupan disebabkan tekanan faktor budaya.

4) Kemiskinan Kronis

Kemiskinan kronis terjadi apabila pengaruh beberapa faktor bekerja secara simultan. Berbagai faktor yang sering menyebabkan kemiskinan kronis dapat bersifat internal dan eksternal. Faktor internal meliputi : sumber daya

⁵¹Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat....*, hal.27-28

⁵²T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hal.326

terbatas, tingkat produksi rendah, budaya menyebabkan perilaku kurang produktif, pendapatan rendah, tunakarya, tingkat pendidikan rendah dan lain-lain. Adapaun faktor eksternal meliputi : lapangan pekerjaan terbatas, fasilitas informasi jaringan kerja belum memadai, penetrasi pasar kuat, daya saing pelaku ekonomi luar sistem sosial lebih kuat dan kebijakan yang kurang berpihak pada kepentingan warga miskin.

5) Kemiskinan Sementara

Jenis kemiskinan sementara terjadi karena siklus ekonomi terganggu oleh berbagai faktor yang mampu mengalihkan kondisi normal ke kondisi tertentu dengan indikasi kemunculan krisis. Masyarakat dimungkinkan terkena kemiskinan sementara ketika menghadapi bencana alam.

D. Masyarakat Desa

Menurut Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa.⁵⁴ Sedangkan arti masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, masyarakat desa adalah masyarakat

⁵³ http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2014_6.pdf , diakses pada 3 Desember 2018

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/desa>, diakses pada 3 Desember 2018

yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor tanam, perikanan, peternakan atau gabungan dari semua itu, dan sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencahariannya itu.⁵⁵

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai pemberdayaan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para akademisi, dan telah dipublikasi secara umum baik dalam bentuk jurnal, skripsi maupun tesis. Karya-karya tersebut telah dihasilkan oleh para peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa,⁵⁶ dengan hasil penelitiannya meliputi keterlibatan semua pihak pelaksana dari mulai pihak provinsi sampai desa adalah sangat mempengaruhi keberhasilan program Jalin Matra PFK yang dilakukan ini dan juga porgram ini secara umum telah memberikan nilai positif bagi keseluruhan KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan). Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk melihat pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melauai program Jalin Matra PFK di Kabupaten Blitar dan dianalisis dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga muslim yang ada.

Yohanis,⁵⁷ bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pengembangan kedelai di Kabupaten Keerom untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu: analisis permintaan dan penawaran, produktivitas, usaha tani,

⁵⁵ <https://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada 3 Desember 2018

⁵⁶ Zulfa Ulin Nuha, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Muslim di Kabupaten Blitar, *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

⁵⁷ Yohanis Rante, "Strategi Pengembangan Tanaman Kedelai Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 15, No. 1, Maret 2013

dan pemasaran, dalam melakukan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa usaha tani kedelai lokal layak untuk diusahakan dan memberikan keuntungan secara finansial di Kabupaten Keerom. Produktivitas kedelai yang tinggi dan pendapatan petani yang cukup baik memungkinkan dikembangkannya strategi peningkatan produksi kedelai lokal dan pengembangan industri pengolahan berbasis kedelai lokal. Tata niaga tani yang cenderung merugikan petani kedelai lokal, mudahnya kedelai impor yang lebih murah masuk ke pasar-pasar di daerah dan harga pupuk yang fluktuatif dan cenderung naik adalah beberapa ancaman yang harus segera ditangani untuk menjamin terciptanya ketahanan pangan Indonesia melalui ketersediaan kedelai lokal yang cukup dan berkelanjutan.

Ita,⁵⁸ yang hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. akan tetapi dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala diantaranya partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

⁵⁸ Ita Ulumiyah, et. all, "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume. 1, No. 5

Bambang,⁵⁹ hasil dari penelitian ini adalah bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Bobby,⁶⁰ dari penelitian ini menghasilkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan berdasarkan sub indikator tahap persiapan program cukup maksimal dilaksanakan. Faktor yang menghambat, yaitu faktor sosialisasi, faktor fasilitas pendukung. Dampak pelaksanaan program cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hermawan,⁶¹ tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Hasil dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan yang selama ini

⁵⁹ Bambang Supriyono, et.all., "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. I, No. 4

⁶⁰ Mardi, Zulkarnaini, "Program Bantuan Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol.2 Nomer 2 Maret 2014

⁶¹ Hermawan, et.all, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11

dilakukan untuk masyarakat Desa Asmorobangun dari proses pemberdayaan cukup baik, namun yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan aktor pendamping bagi petani dalam proses pemberdayaan tersebut, hasil dari pemberdayaan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan belum maksimal masih terdapat hambatan. Faktor penghambat tersebut berupa masalah ketersediaan tenaga kerja dan upah yang mahal, pengaruh musim cuaca, terdapat kelompok tani yang kurang aktif dan juga kurangnya sumber daya pendukung seperti penyuluh pertanian sebagai pendamping petani.

Dari beberapa paparan penelitian yang meneliti terkait dengan pemberdayaan ekonomi, secara umum penelitian tersebut memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti terkait program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk dimanfaatkan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Program Pemerintah yang diteliti dalam penelitian ini adalah program Pemerintah Jawa Timur yakni program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya secara umum adalah pada penelitian sebelumnya lebih meneliti kearah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, dan penelitian yang dilakukan peneliti adalah lebih pada kontribusi/sumbangan yang diberikan dari program pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dalam hal ini adalah program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan.